

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntabilitas kinerja keuangan sangat penting untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah karena merupakan salah satu kunci untuk kepemimpinan yang baik dalam organisasi publik, terkait dengan pertanggung jawaban atas sumber dana publik. Selain itu, keberhasilan organisasi publik dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Salah satu dasar hukum organisasi adalah akuntabilitas kinerja. Akibatnya, organisasi diwajibkan secara hukum untuk memenuhi tanggung jawabnya atas kinerja yang dihasilkannya sebagai cara untuk membantu orang banyak. Sumber daya manusia harus dapat diolah, digerakkan, dan digunakan secara efisien agar organisasi pemerintah dapat mencapai tujuan mereka. Selain itu, tingkat kinerja aparatur pengelola keuangan dapat berdampak pada kemajuan suatu pemerintahan, terutama dalam hal penyediaan layanan publik yang tepat dan efisien.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat SAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mencakup berbagai kegiatan, alat, dan prosedur yang dirancang sebagai kumpulan sistematis Penentuan pengukuran, mengumpulkan, mengklarifikasi, merangkum, dan melaporkan data kinerja lembaga terkait akuntabilitas dan peningkatan kinerja Pemerintah. SAKIP merupakan sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja yang selaras dengan penerapan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi

wajib mencatat dan melaporkan penggunaan sumber daya negara dan kepatuhannya terhadap peraturan yang berlaku. Sedangkan LAKIP kini menjadi laporan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah. LAKIP merupakan produk akhir SAKIP dan menggambarkan kinerja suatu instansi dalam melaksanakan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Pembentukan LAKIP didasarkan pada siklus anggaran sepanjang tahun. Dalam mengembangkan LAKIP, lembaga harus mampu menentukan secara kuantitatif jumlah layanan yang akan diberikan, baik dalam satuan ukuran maupun persentase. Manfaat LAKIP dapat dijadikan bahan evaluasi tahunan bagi kementerian dan lembaga terkait. Cikal bakal SAKIP LAKIP berasal dari Perintah Eksekutif No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintahan. Perintah tersebut menetapkan bahwa setiap lembaga pemerintah sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang harus bertanggung jawab atas pelaksanaan misi utamanya.

Organisasi sektor publik memiliki hubungan dekat dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus melaksanakan pengelolaan yang berpusat pada kepentingan daerah. Artinya kita perlu mencapai hal ini melalui praktik tata kelola yang baik dan bersih. Tata kelola yang baik menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap apa yang direncanakan dan disampaikan melalui program pelayanan publik. Pemerintah terus melakukan inovasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan standar pengelolaan yang telah ditetapkan. Tingkat kepuasan masyarakat menjadi tolak ukur untuk mengetahui apakah pelayanan yang diberikan memuaskan atau mengecewakan masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik. Untuk mencapai keberhasilan

tersebut diperlukan sumber daya manusia, sarana, prasarana yang mumpuni, alokasi anggaran dan peraturan pengelolaan keuangan Pemerintah yang profesional.

Pengelolaan keuangan publik harus dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab, sesuai dengan peraturan keuangan publik. Anggaran merupakan suatu hal yang sangat relevan dan penting dalam sektor pemerintahan karena berdampak pada tanggungjawab pemerintah, yang berkaitan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Reformasi anggaran pemerintah telah membawa perubahan pada struktur anggaran dan proses penyusunan APBN untuk menciptakan transparansi dan meningkatkan akuntabilitas publik. Salah satu bentuk reformasi anggaran yang bertujuan untuk memperbaiki proses penganggaran adalah dengan menerapkan penganggaran berbasis kinerja.

Reformasi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah mengakibatkan perubahan struktur anggaran dan perubahan proses penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk menciptakan transparansi dan meningkatkan akuntabilitas publik. Bentuk reformasi anggaran dalam upaya memperbaiki proses penganggaran adalah penerapan anggaran berbasis kinerja. Anggaran berbasis kinerja merupakan suatu metode penganggaran yang menghubungkan setiap biaya yang diuraikan dalam kegiatan-kegiatan dengan hasil (output) dan manfaat (outcome) yang dihasilkan. Manfaat tersebut dituangkan dalam sasaran kinerja untuk masing-masing satuan kerja. Tujuan yang ingin dicapai diidentifikasi dalam program, beserta pendanaan untuk setiap tingkat pencapaian tujuan.

Instansi Pemerintah adalah organisasi yang merupakan kumpulan orang-orang yang dipilih secara khusus untuk melaksanakan tugas negara sebagai bentuk pelayanan kepada orang banyak. Tujuan instansi pemerintah dapat dicapai apabila mampu mengolah, menggerakkan dan menggunakan sumber daya manusia yang dimiliki secara efektif dan efisien. Tingkat kinerja aparatur pengelola keuangan juga dapat mempengaruhi kemajuan suatu pemerintahan, khususnya dalam memberikan tolak ukur apakah pelayanan yang diberikan sudah memuaskan atau mengecewakan masyarakat sebagai pengguna layanan publik. Untuk mencapai keberhasilan tersebut perlu adanya kompetensi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pengalokasian anggaran serta dibutuhkan regulasi dalam manajemen keuangan pemerintahan yang profesional.

Pada Tahun 2021-2023 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), menetapkan bahwa penilaian akuntabilitas kinerja untuk Pemerintah Kota Banda Aceh mendapatkan predikat B ini menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik, meskipun masih memiliki ruang untuk peningkatan. SAKIP memainkan peran strategis dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, dengan fokus pada perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan pencapaian sasaran atau kinerja organisasi. Melalui SAKIP, instansi pemerintah dapat meningkatkan transparansi, pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pengawasan kinerja mereka, yang pada gilirannya akan mendukung peningkatan kinerja secara keseluruhan (Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh 2021-2023).

Selain itu Sekda Aceh menyatakan untuk meningkatkan pencapaian di masa mendatang, sangat dibutuhkan pengawasan yang lebih ketat oleh BPK dari berbagai aspek lainnya, agar sistem pemerintahan lebih transparan dan akuntabel. Sekda menambahkan, sistem pemerintahan yang bersih dan terpercaya akan membuat program pembangunan berjalan lebih efektif. Sehingga aktivitas pembangunan mampu memberi daya dorong yang lebih kuat untuk peningkatan kesejahteraan rakyat (Meriska, 2023).

Secara formalitas pemerintah kota Banda Aceh sudah mengaplikasinya, tetapi tidak menjadi jaminan terhadap pencapaian kinerjanya. Dalam proses pelaksanaannya masih terdapat kesalahan dan penyimpangan pada tingkat teknis sehingga pelaksanaannya belum membawa hasil yang optimal. Belum optimalnya pengelolaan keuangan tercermin pada Laporan Realisasi Anggaran 3 tahun terakhir (2020-2022). Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.1 ringkasan pos belanja LRA pemerintah Kota Banda Aceh.

Tabel 1.1 Ringkasan Pos Belanja LRA Pemerintah Kota Banda Aceh

Tahun Anggaran	APBD	Realisasi	Selisih
2021	1.332.172.790.386	1.207.566.184.958	124.606.605.428
2022	1.410.626.047.131	1.334.880.241.909	75.745.805.222
2023	1.305.573.490.597	1.283.554.951.050	22.018.539.547

Sumber : LRA Pemerintah Kota Banda Aceh (2021-2023)

Berdasarkan data di atas, anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah. Jumlah anggaran yang benar-benar terpakai atau terealisasi dalam pelaksanaan. Perbedaan antara APBD dan realisasi, dapat berupa surplus (jika realisasi lebih besar dari APBD) atau defisit (jika realisasi lebih kecil dari APBD). Secara umum, APBD mengalami

peningkatan dari tahun ke tahun, menunjukkan adanya proyeksi pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan pembangunan yang semakin besar. Selama tiga tahun realisasi anggaran selalu lebih rendah dari APBD selisih antara APBD dan realisasi cukup signifikan, menunjukkan adanya potensi anggaran yang belum termanfaat secara optimal.

Fenomena dalam penelitian ini dalam laporan yang disampaikan Kepemimpinan Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman dan Wakil Wali Kota Zainal Arifin (Amin-Zainal) dalam lima tahun terakhir memimpin Kota Banda Aceh membawa perubahan yang signifikan untuk kesejahteraan masyarakat dalam berbagai sektor. Sedangkan untuk realisasi PAD Kota Banda Aceh secara keseluruhan dari tahun ke tahun mengalami fluktuatif, pada tahun 2020 dan 2021 realisasi PAD tidak mencapai target, dikarenakan pandemi Covid-19 (HZ, 2022).

Penganggaran berbasis kinerja, Pemerintah Banda Aceh dapat menetapkan target kinerja spesifik untuk sumber daya manusianya, seperti peningkatan keterampilan, pelayanan publik yang lebih baik, atau pengelolaan sumber daya manusia yang efektif. Penetapan tujuan tersebut harus konsisten dengan visi, misi dan prioritas pembangunan pemerintah Kota Banda Aceh. Melalui penganggaran berbasis kinerja, pemerintah Kota Banda Aceh dapat mengalokasikan dana untuk pelatihan, pendidikan berkelanjutan, pengembangan keterampilan dan program lainnya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di semua tingkat pemerintahan yang berbeda. Pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien dapat memastikan bahwa investasi tersebut memberikan hasil yang optimal dalam meningkatkan kinerja SDM. Penerapan penganggaran berbasis kinerja

memungkinkan pemerintah Aceh untuk memantau dan mengevaluasi kinerja sumber daya manusia secara sistematis. Hal ini mencakup penilaian terhadap pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan, identifikasi kebutuhan pengembangan lebih lanjut, serta pengakuan terhadap capaian sumber daya manusia pemerintah.

Anggaran pemerintah adalah rencana keuangan yang menentukan alokasi dana untuk berbagai kegiatan dan program yang dilakukan pemerintah. Aspek penting dalam penganggaran pemerintah adalah pengelolaan sumber daya manusia (SDM), yang mencakup pengelolaan pegawai negeri, pelatihan, pengembangan, dan berbagai kebijakan terkait aparatur pemerintah. Menganalisis kebutuhan sumber daya manusia untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah, termasuk penilaian terhadap jumlah, kualifikasi dan keterampilan yang dibutuhkan. Pemerintah harus memastikan sumber daya manusianya efisien dan efektif dalam menjalankan tugasnya. Hal ini mungkin melibatkan pengalokasian dana untuk pelatihan dan pengembangan, peningkatan sistem manajemen kinerja, dan lain-lain. Anggaran pemerintah juga dapat mencakup upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui investasi pada pendidikan, pelatihan atau program pengembangan pegawai. Anggaran pemerintah juga harus memperhatikan perencanaan jangka panjang terkait kebutuhan sumber daya manusia di berbagai sektor pemerintahan, termasuk mengantisipasi perubahan demografi dan teknologi yang dapat mempengaruhi komposisi dan kualitas angkatan kerja.

Sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten cenderung berkinerja lebih baik dalam tugas-tugas administratif dan pembangunan di pemerintahan

daerah. Pelatihan pendidikan berkelanjutan dan pengembangan keterampilan bagi pegawai negeri sipil dapat meningkatkan keterampilan yang dimiliki, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan. Kepemimpinan yang efektif dalam pemerintahan daerah sangat penting dalam pengelolaan sumber daya manusia. Salah satu permasalahan yang menjadi fokus perhatian adalah rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Aceh. Ahmad Dadek menekankan pentingnya peningkatan kualitas SDM sebagai langkah strategis dalam mendukung pembangunan di masa depan. Upaya peningkatan keterampilan, pendidikan, dan akses terhadap informasi diharapkan dapat merangsang pertumbuhan positif dalam sektor ini. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang belum maksimal menjadi sorotan utama dalam pernyataan Ahmad Dadek. Meskipun telah ada kemajuan, Aceh masih menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan potensi ekonominya. Dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, perlu adanya strategi yang lebih efektif untuk mendorong investasi, mengembangkan sektor-sektor unggulan, dan menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan (Anshori, 2023).

Berdasarkan hasil penelitian dari (Widya, 2020) Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, kompetensi sumber daya manusia dan pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Gianyar. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, kompetensi sumber daya manusia dan pengendalian intern maka semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten

Gianyar. Hasil penelitian dari (Septi Masitoh, Dewi Sarifah Tullah, Erma Apriyanti, 2020) Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Good Government Governance berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah di Provinsi Jawa Barat dan Banten, sedangkan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah di Provinsi Jawa Barat dan Banten. Hasil penelitian dari (Safida et al., 2023) Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan audit internal mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa secara bersama-sama sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber adaya manusia dan audit ineternal berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian (Mahardini & Miranti, 2018) hasil penelitian menunjukkan menunjukkan: penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015. Hal ini membuktikan bahwa semakin baik tingkat penerapan standar akuntansi pemerintahan yang dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan, maka akan berdampak positif pada peningkatan kualitas laporan keuangan; kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015. Semakin tinggi kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki, seperti tingkat pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan cenderung semakin baik.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian tambahan tentang **”Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Banda Aceh.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, berikut ini adalah rumusan masalah yang dapat diajukan untuk penelitian ini yaitu:

1. Apakah terdapat pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja keuangan pada Satuang Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Banda Aceh?
2. Apakah terdapat pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas kinerja keuangan pada Satuang Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Banda Aceh?

1.3 Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja keuangan pada Satuang Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Banda Aceh.

2. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas kinerja keuangan pada Satuang Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Banda Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kota Banda Aceh

Diharapkan dari hasil penelitian ini sebagai evaluasi pemerintahan agar dapat mengoptimalkan penerapan berbasis kinerja dan kompetensi sumber daya manusia pada Pemerintah Kota Banda Aceh.

2. Bagi penulis

Sebagai sarana dan perkembangan ilmiah dalam mengembangkan ilmu pengetahuan terutama yang berkembang dalam dunia pendidikan yang kondusif dan efektif selama melaksanakan studi diperguruan tinggi yang berhubungan dengan masalah yang mengacu pada penerapan berbasis kinerja dan kompetensi sumber daya manusia pada Pemerintah Kota Banda Aceh.

3. Bagi mahasiswa

Dari hasil penelitian ini khususnya bagi mahasiswa dapat dijadikan referensi tambahan tentang penerapan berbasis kinerja dan kompetensi sumber daya manusia pada Pemerintah Kota Banda Aceh.